

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa serta memiliki lahan terbuka hijau yang subur dan luas. (Jaya, 2018;). Mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan kondisi alam ini untuk bercocok tanam, terutama di sektor pertanian. (Kamaluddin et.al, 2012). Lahan pertanian memang memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian (Janti et al., 2016; Purwaningsih et al., 2015). Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi suatu negara karena kebutuhan pokok tercukupi dari hasil mentah seperti padi yang diolah menjadi beras untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok (Mulyo et al., 2015). Beras menjadi makanan yang sangat penting karena sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketersediaan dan akses terhadap beras berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Kekurangan beras dapat menimbulkan masalah serius dari sudut pandang keamanan pangan. Stok beras Nasional menjadi kemampuan Indonesia dalam menjaga kecukupan stok beras di tingkat nasional merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan. (Darwanto, 2005; Santosa & Sudrajat, 2010).

Pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Bahan-bahan yang dikonsumsi manusia setiap hari diperoleh dari air dan sumber hayati. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan produksi, perdagangan dan distribusi, penyelenggaraan cadangan pangan lokal, serta mencegah dan mengelola masalah pangan.

Dalam perspektif sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) mulai mengemuka saat terjadi krisis pangan dan kelaparan yang menimpa dunia pada 1971. Sebagai kebijakan pangan dunia, istilah ketahanan pertama kali digunakan oleh PBB untuk membebaskan dunia, terutama negara-negara sedang berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa

itu, sesuai dengan definisi PBB adalah menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan dunia dari krisis pangan. Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada *International Conference of Nutrition* pada 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif (Hakim, 2014).

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional (Deptan, 1999). Dalam pengertian kebijakan operasional pembangunan, Departemen Pertanian menterjemahkan ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Padi sebagai hasil sektor pertanian menjadi komoditas pangan tertinggi di Indonesia mengalahkan komoditas pangan lain, seperti: jagung, telur, ubi dan sayur. Tingginya produksi padi yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berkaitan erat dengan tingginya konsumsi beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat. Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi padi nasional menunjukkan angka sebesar 122,3 kg/kapita (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2022). Angka konsumsi beras yang tinggi tidak berbanding lurus dengan angka produksi padi. Hal ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan pada wilayah penghasil komoditas tersebut. Masyarakat harus memperhatikan ketersediaan padi dan juga akses pangan yang ada di suatu wilayah agar wilayah tersebut mampu disebut sebagai wilayah yang tahan pangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ali et al. (2017) dan Fauzi et al., (2019) yang

menyatakan bahwa, setiap orang harus memiliki aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar hidup sehat dan produktif.

Keterjangkauan pangan mengacu pada kemampuan seluruh keluarga petani dan individu, termasuk akses fisik, ekonomi, dan sosial, untuk memperoleh pangan yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (FAO 2015). Akses Fisik: Akses terhadap infrastruktur pasar, pasar dan fungsi pasar. Akses Ekonomi: Kemampuan finansial untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi. dan Akses Sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk memperoleh mekanisme dukungan informal. Indikator akses fisik adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Indikator akses ekonomi diwakili oleh perubahan harga beras, proporsi pengeluaran pangan per kapita, dan proporsi penduduk miskin. Akses sosial, sebuah program bantuan sosial, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena data di tingkat kabupaten tidak tersedia.

Menurut Rachmat (2020), terdapat dua aspek yang mempengaruhi indikator kesejahteraan: *Pendapatan*. Sumber pendapatan utama keluarga adalah dari sektor pertanian atau non pertanian. Pengeluaran untuk makanan: semakin tinggi pengeluaran untuk makanan, maka pendapatan rumah tangga relatif terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (subsistem). Sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran non-makanan, maka semakin besar pula transisi dari subsistem ke perdagangan, yaitu kebutuhan pangan terpenuhi dan kelebihan pendapatan digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan non pangan lainnya. Kesejahteraan rumah tangga tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan. Rumah tangga yang mampu mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan non-pangan dianggap lebih sejahtera karena telah melampaui tahap pemenuhan kebutuhan dasar.

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran. Proporsi penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Kesejahteraan khususnya perlu diperhatikan karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pangan lokal.

Keterjangkauan pangan dapat dipengaruhi oleh kemiskinan penduduknya. Ketahanan pangan rumah tangga rendah ketika kemiskinan penduduknya tinggi. Tabel 1 menunjukkan angka kemiskinan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2018	172,4	(0,9)
2019	159,9	(7,25)
2020	181,5	(3,5)
2021	200,6	10,52
2022	194,1	(3,24)
Rata-rata	181,7	(0,87)

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2023.

Tabel 1 memberikan informasi rata-rata angka kemiskinan penduduk Kabupaten Tasikmalaya dalam periode lima tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata 0,87 persen. Hal ini tentunya merupakan tren yang positif, dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun. Diharapkan kemampuan setiap rumah tangga dalam mengakses pangan akan meningkat dan ketahanan pangan rumah tangga akan tercapai.

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan akses terhadap peluang kerja. Oleh karena itu, ketersediaan listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat atau rumah tangga yang pada akhirnya mempengaruhi situasi ketahanan pangan. Infrastruktur dasar seperti listrik memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga pada aspek ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. (Dewan Ketahanan Pangan dan *World Food Programme* 2013). Perkembangan suatu wilayah pada dasarnya dipengaruhi oleh infrastruktur yang dimilikinya. Salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi pembangunan daerah adalah ketenagalistrikan. Ketersediaan infrastruktur listrik di pedesaan membuka peluang peningkatan taraf hidup sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan akses listrik yang memadai dapat digunakan untuk membangkitkan

usaha, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja baru, dan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.

Secara administratif DAS Citanduy meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banyumas, dan Kota Cilacap di Jawa Tengah. Potensi sumber daya air di Jawa Barat sangat besar, dan beberapa daerah aliran sungai mempunyai potensi untuk memanfaatkan sumber daya air, dan selama ini pengelolaannya hanya sebatas pembangunan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas, DAS Citanduy termasuk Das kritis dari 108 DAS kritis di Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 hingga 2014, DAS Citanduy masuk dalam DAS yang diusulkan sebagai DAS prioritas. Salah satu sungai yang berhulu di DAS Citanduy adalah Gunung Cakrabuana melalui Sungai Ciwalen, yang secara administratif terletak di Desa Nanggwer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Bagian hulu Sungai Citanduy, sangat sentral terhadap lingkungan, oleh karena itu kerusakan di bagian hulu juga berdampak pada bagian hilir. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri, khususnya bagi masyarakat Desa Nanggwer yang terletak di hulu Sungai Citanduy.

Agar pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi dan mencegah memburuknya kondisi lingkungan lebih lanjut, dengan membandingkan antara penghasilan yang diperoleh dengan total pengeluaran. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persentase jumlah rumah tangga petani miskin di Desa Nanggwer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran pangan rumah tangga petani di Desa Nanggwer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, dan persentase rumah tangga petani tanpa akses listrik di Desa Nanggwer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Berapa persentase rumah tangga petani di bawah garis kemiskinan di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung?
- 2) Berapa persentase rumah tangga petani dengan pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung?
- 3) Berapa persentase rumah tangga petani tanpa akses listrik di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis:

- 1) Persentase rumah tangga petani di bawah garis kemiskinan di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung.
- 2) Persentase pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran rumah tangga petani di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung.
- 3) Persentase rumah tangga petani tanpa akses listrik di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengaplikasian materi-materi yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi.
- 2) Bagi Rumah Tangga Petani di Desa Nanggewer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang keterjangkauan pangan rumah tangga petani di Desa Nanggewer sehingga dapat mengetahui ketahanan pangan serta mampu mensejahterakan rumah tangga petani.

- 3) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pangan dan ketahanan pangan.
- 4) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenis.